

## CAN THE WELFARE OF HINDU CLERGY IN BALI BE ASSESSED USING AMARTYA SEN'S CAPABILITY APPROACH

### DAPATKAH KESEJAHTERAAN ROHANIWAN HINDU DI BALI DIKAJI DENGAN PENDEKATAN KAPABILITAS AMARTYA SEN?

A.A.K. Ayuningsasi<sup>1a(\*)</sup> M.K.S Budhi<sup>2b</sup> I.N.M Yasa<sup>3c</sup> A.A.I.N. Marhaeni<sup>4d</sup> I.K. Sudibia<sup>5e</sup> M.H.U. Dewi<sup>6f</sup>

<sup>1-6</sup>Udayana University, Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia.

<sup>a</sup>[ayuningsasi@unud.ac.id](mailto:ayuningsasi@unud.ac.id)

(\*) Corresponding Author  
 nomor HP yang dapat dihubungi

**How to Cite:** Nama Penulis. (2023). Title of article. Santhet, x(x), 1-xx.

doi: 10.36526/js.....

Received : 16-11-2022  
 Revised : 06-04-2023  
 Accepted : 30-04-2023

**Keywords:**  
 Capability,  
 Hindu Clergy,  
 Welfare

#### Abstract

The movement space of Sulinggih, the Balinese Hindu clergy, is severely restricted in various aspects due to the rules set by the Balinese community to preserve its sanctity. These social rules dictate that Sulinggih must relinquish secular work and focus solely on religious activities. This study aims to explore the applicability of Amartya Sen's Capability Approach theory in analyzing the well-being of Hindu clergy in Bali. The research employs a qualitative method, specifically a literature study. The study reviews the variables identified by Amartya Sen in his writings and studies, which have also been further examined by economists. Based on the analysis, this study proposes a conceptual framework to elucidate and predict how the variables in Sen's theory influence the welfare outcomes of Hindu clergy in Bali. The framework considers commodities and capabilities as potential mediating variables, while conversion factors and social choices are seen as factors that moderate the impact of resources on the attainment of functionings.

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan menggambarkan suatu keadaan dimana terpenuhinya segala aspek dalam kehidupan manusia, tidak hanya dari sisi kemakmuran (aspek kehidupan material), namun juga aspek spiritual dan sosial. Pencapaian kesejahteraan khususnya dalam bidang ekonomi sudah mendapat perhatian para ekonom sejak lama. Dalam perkembangannya muncul berbagai teori-teori ekonomi yang saling bertentangan terkait dengan konsep maupun upaya pencapaiannya. Pengukuran kesejahteraan dengan *Capability Approach* (CA) oleh Amartya Sen merupakan pengembangan teori dan konsep kesejahteraan yang menekankan pada pentingnya etika dan moral dalam ekonomi. Konsep kebebasan juga dituangkan oleh Amartya Sen dalam pendekatan kapabilitas untuk mencapai kesejahteraan. Menurutnya, kapabilitas yang semakin besar akan menciptakan kebebasan dalam merespon berbagai peluang yang ada, sehingga memungkinkan bagi individu untuk dapat menjalani hidup yang lebih bermakna atau dengan kata lain lebih sejahtera (Susilo et al., 2017).

Pendekatan kapabilitas (CA) oleh Amartya Sen telah mengantarkannya sebagai peraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1998 atas kontribusinya terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Dalam tulisan-tulisannya, Amartya Sen banyak mengulas mengenai ide kebebasan diantaranya dalam *The Standard of Living* (1987a), *On Ethics and Economics* (1987b), *Inequality*

*Reexamine* (1992), *The Quality of Life* (1993), *Development as Freedom* (1999), *Rationality of Freedom* (2004), dan *The Idea of Justice* (2009).

Dalam pengukuran kesejahteraan individu, CA memperkenalkan beberapa istilah yaitu *resources*, *commodities*, *capabilities*, dan *functionings*. Secara garis besar, CA menggambarkan adanya hubungan antara istilah-istilah tersebut. *Resources* diartikan sebagai sarana, cara, atau upaya yang dimiliki seseorang untuk memperoleh *commodities*, sedangkan *commodities* adalah barang dan jasa yang memiliki karakteristik tertentu yang memungkinkan seseorang memiliki *capabilities* untuk mencapai suatu *functioning*.

Selain keterkaitan tersebut, teori Sen menekankan adanya hubungan antara *commodities* dan *capabilities* untuk mencapai sesuatu dan menjadi sesuatu dipengaruhi oleh *conversion factors* yaitu karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan karakteristik lingkungan. Selain itu, adanya kendala-kendala (*constraints*) menyebabkan individu harus menetapkan pilihan (*choices*) untuk mencapai suatu capaian (Robeyns, 2003). Apabila dikaitkan dengan teori Sen, terdapat pilihan pribadi (kebebasan memilih) yang dibatasi oleh kebebasan orang lain atau kebebasan yang diputuskan secara bersama atau yang disebut sebagai pilihan sosial (*social choices*).

Luasnya teori Amartya Sen khususnya CA dalam mengkaji kesejahteraan manusia masih membutuhkan banyak kajian karena berkaitan juga dengan luasnya aspek, objek, dan subjek kesejahteraan manusia. Terdapat beberapa upaya untuk menerapkan CA dalam berbagai konteks yang berbeda. Tulisan-tulisan peneliti lain yang juga mempertimbangkan pengaplikasian CA diantaranya penelitian oleh Garnham (2007) terkait evaluasi kesejahteraan pada bidang komunikasi, Mok & Jeong (2016) terkait *education for ethical development*, serta Britz *et al.* (2013) terkait *information-based rights framework*.

Perhatian terhadap kesejahteraan rohaniawan sebagai salah satu subjek dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi bahan kajian peneliti sejak lama. Beberapa diantaranya adalah kajian dari Frame & Shehan (1994), Blanton & Morris (1999), Proffitt *et al.* (2007), Trawick & Lile (2007), Haney (2008), Ok (2009), Stewart-Sicking *et al.* (2011), Parker & Martin (2011), Tanner & Zvonkovic (2011), Tanner *et al.* (2012), Proeschold-Bell *et al.* (2013), Thomas & Plante (2015), Bickerton *et al.* (2015), Walker *et al.* (2018), dan Rosales *et al.* (2021). Tulisan-tulisan tersebut mengkaji berbagai aspek dan determinan kesejahteraan rohaniawan pada berbagai agama dan aliran kepercayaan, serta dengan menggunakan pendekatan yang juga berbeda-beda.

Dalam kajian ini, rohaniawan selayaknya insan manusia lainnya dikonseptualisasikan memiliki peluang atau kebebasan nyata untuk mencapai tindakan yang dihargai dan menjadi seseorang dalam aktivitas yang berhubungan dengan kesejahteraan. Analisis mengenai kesejahteraan rohaniawan Hindu atau yang disebut *Sulinggih* menjadi penting dalam kaitannya dengan terwujudnya kesejahteraan sosial di Bali, di satu sisi bagi *Sulinggih* itu sendiri (sebagai individu) dan di sisi lainnya bagi masyarakat dan negara. Hal ini terkait dengan fungsi dan peran *Sulinggih* pada masyarakat Hindu di Bali yaitu turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau di Bali disebut sebagai *adi guru loka*.

Kajian ini difokuskan kepada *Sulinggih* karena terdapat indikasi pembatasan kebebasan individu dalam aspek kemanusiaan terhadap *Sulinggih*, khususnya terkait dengan terbatasnya pilihan dan kesempatan dalam upaya pencapaian kesejahteraannya (Ayuningsasi & Sukadana, 2022). Ruang gerak *Sulinggih* dalam berbagai aspek sangat terbatas karena terkait dengan berbagai aturan yang ditetapkan oleh masyarakat di Bali dalam upaya menjaga kesuciannya. Beberapa aturan yang diterapkan secara sosial di masyarakat diantaranya adalah *Sulinggih* harus melepas pekerjaan yang bersifat keduniawian dan melaksanakan aktivitas sehari-hari yang berfokus hanya pada kegiatan agama. Di lain sisi, *Sulinggih* di Bali merupakan rohaniawan yang berumah tangga (*Wiku Grhasta*) dan umumnya masih memiliki tanggungan keluarga. *Sulinggih* di Bali dapat digambarkan seperti Pendeta pada agama Kristen Protestan, namun aktivitasnya dibatasi oleh berbagai aturan yang ketat selayaknya Pastor pada agama Kristen Katolik.

Untuk alasan ini, kami meyakini terdapat permasalahan dalam upaya pencapaian kesejahteraan oleh rohaniawan Hindu di Bali, sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut dengan mengkaji variabel-variabel yang berkaitan dengan kesejahteraan. Studi ini memberikan kontribusi yang berharga pada pengembangan literatur terkait teori kesejahteraan Sen, khususnya dalam CA. Studi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian empiris yang bertujuan untuk mengoperasionalkan teori kesejahteraan Sen.

## METODE

Metode penelitian adalah metode kualitatif. Metode ini menekankan aspek pemahaman dengan lebih mendalam terhadap suatu masalah (Sulistyawati, 2019). Sumber data penelitian adalah data sekunder yang didapat dari beberapa dokumen dan artikel. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Teknik analisis data kualitatif digunakan, maksudnya adalah data dokumen yang dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Susilo, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Functionings dalam Pengukuran Kesejahteraan Sulinggih di Bali**

Menurut Sen (1999), kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari tingkat pencapaian (*functionings*) yang dapat dicapai dalam hidupnya. *Functioning* adalah sebuah pencapaian seseorang, apa yang ingin dilakukan, dan ingin menjadi apa. *Functionings* adalah sebuah konsep menyeluruh yang meliputi seperti apa seseorang, apa yang dilakukannya, dan apa yang dimilikinya yang juga meliputi kebebasan sebagai bagian dari seseorang. Menurut Zwierzchowski & Panek (2020), ini berarti *functionings* merupakan manifestasi dari pilihan yang dilakukan individu saat menentukan jalan hidupnya. *Functionings* dalam konsep yang kompleks meliputi pencapaian harga diri, menjadi terintegrasi secara sosial, bahagia, dan mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat (Crespo, 2013). Ini berarti dalam lingkup yang lebih kompleks, capaian kesejahteraan juga meliputi indikator-indikator dalam pengukuran kesejahteraan subjektif (SWB).

Beberapa ekonom melakukan kajian secara empiris untuk mengoperasionalkan konsep *functioning* dalam CA. Berdasarkan kajian empiris Schokkaert & Van Ootegem (1990), Balestrino, (1994), Laderchi (1997), Brandolini & D'Alessio (1998), Martinetti (2000), Klasen (2000), Lelli (2001), Phipps (2002), Burchardt & LeGrand (2002), Robeyns (2003), Anand *et al.* (2005), Kuklys (2005), dan Anand & Van Hees (2006) secara umum setidaknya terdapat tiga *functionings* dalam pengukuran kesejahteraan individu dengan CA yang dapat diaplikasikan dalam pengukuran kesejahteraan *Sulinggih* di Bali diantaranya adalah:

- 1) *Physical functionings* meliputi *health, housing, dan environmental quality*.
- 2) *Psychological functionings* antara lain *happiness, personal integrity, dan leisure*.
- 3) *Social functionings* yaitu *intellectual stimulation, social relations, dan cultural activities*.

Ketiga *functionings* ini sesuai dengan konsep kesejahteraan yang dianut oleh umat Hindu di Bali yang merupakan standar hidup sejahtera yaitu *wareg, waras, wastra, wisma, dan wasita* (Wiana, 2006). Konsep *wareg, wastra, dan wisma* merupakan pemenuhan kebutuhan biologis manusia masuk dalam kategori *physical functionings*. *Waras* merupakan pemenuhan kebutuhan

mental manusia dapat dimasukkan dalam *psychological functionings*, sedangkan *wasita* merupakan pemenuhan kebutuhan sosiologis dapat dimasukkan dalam *social functionings*.

Menurut Wiana (2006), *wareg* dapat dimaknai ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan pangannya sesuai dengan kebutuhan fisiknya akan gizi dalam artian wajar menurut ukuran umum (cukup pangan dalam mempertahankan hidup yang sehat). *Wastra* artinya mampu memenuhi kebutuhannya dalam bidang sandang secara wajar menurut ukuran masyarakat pada umumnya. *Wisma* yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya pada papan atau perumahan yang sehat dan wajar. *Waras* artinya sehat dan bugar secara non fisik atau pikiran. *Wasita* yaitu mampu memenuhi kebutuhan dalam pendidikan dan seni budaya. *Wasita* dalam bahasa *Sanskerta* berarti "berkata" sehingga dalam hal ini dapat dimaknai bahwa berkata sangat penting dalam kehidupan bersama atau dalam hubungan sosial karena berkata adalah cermin dari kualitas diri seseorang. Agar dapat mengikuti kehidupan bersama dalam suatu masyarakat dimana diperoleh pendidikan dan pemahaman kebudayaan lingkungannya merupakan salah satu dari kebutuhan pokok dalam hidup bersama.

### **Capabilities dalam Pengukuran Kesejahteraan Sulinggih di Bali**

Sen (1999) menyebutkan bahwa kapabilitas dapat dimaknai sebagai seperangkat capaian individu yang berpotensi untuk dicapai oleh individu. Zwierchowski & Panek (2020) memaknai kapabilitas dalam hal ini adalah cara potensial seseorang untuk menjadi sesuatu dan melakukan sesuatu yang dapat diakses. Ini berarti pada kasus ini, bukan pencapaian yang diperhitungkan untuk analisis kesejahteraan, tetapi potensi prestasi. Menurut Kuklys (2005:6), tingkat kesejahteraan yang dicapai dalam hal ini dimaknai sebagai variabel pilihan dimana individu memiliki pilihan untuk memilih tingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Gasper (1997) menyatakan bahwa kumpulan/himpunan/set kapabilitas merupakan himpunan tertentu yang terdiri atas pilihan seseorang dimana setiap pilihan merupakan suatu alternatif untuk melakukan sesuatu atau yang dalam teori Amartya Sen disebut *functionings*, antara lain melakukan sesuatu (*doing*) atau menjadi sesuatu (*being*) dari apa yang dipilihnya. Gasper menyebutnya dengan istilah kapabilitas-O (*O-capabilities*) yaitu O untuk *Options* atau pilihan dan O untuk *Opportunities*.

Lebih lanjut menurut Amartya Sen, ada tiga konteks yang akan dijelaskan dalam rumusan kapabilitas, yaitu refleksi mengenai ketidakmampuan manusia, refleksi mengenai ukuran kualitas hidup, dan refleksi terhadap *primary goods*. Menurut Sen (2009), hal yang terpenting dan paling bernilai bagi setiap manusia adalah menentukan sesuatu yang dianggap baik dan tidak ada paksaan. Selain tidak dipaksa, seseorang juga harus memiliki kemampuan untuk meraihnya. Ketidakmampuan adalah kondisi dimana seseorang tidak bisa meraih sesuatu yang dianggap bernilai. Hal ini merupakan refleksi mengenai ketidakmampuan manusia.

Menurut Amartya Sen (Gotoh, 2021), kapabilitas seseorang terdiri atas kumpulan vektor alternatif *functionings* yang mewakili kebebasannya secara riil sebagai peluang untuk mencapai tujuan (melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu) berdasarkan atas rata-rata sumber daya dan kemampuan pemanfaatannya. Amartya Sen menegaskan bahwa kebebasan secara umum dan kebebasan berperilaku secara khusus merupakan bagian dari kekuatan afektif yang dimiliki oleh seseorang. Secara khusus, ide kebebasan berperilaku ini mengandaikan status pelaku yang memiliki tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang dianggap baik yang kadang dianggap sebagai tindakan yang didasarkan pada komitmen. Dalam komitmen, seorang pelaku memutuskan hubungan antara pilihan tindakan yang diambil dan motif maksimalisasi kepentingan diri (Juniarta et al., 2013).

Beberapa ahli mengelompokkan *capability* menjadi beberapa kelompok. Menurut Van Hees (2020), terdapat beberapa tipe kapabilitas yang dikembangkan berdasarkan teori Amartya Sen diantaranya adalah *direct capabilities* yaitu kapabilitas yang dimiliki seseorang tanpa keterlibatan pihak lainnya. Selain itu, tipe lainnya adalah *external capabilities* yaitu kapabilitas seseorang yang dapat diakses karena orang lain juga memiliki akses ke kapabilitas tersebut dengan kata lain kapabilitas ini dimiliki ketika seseorang menjadi anggota pada suatu kelompok. Tipe kapabilitas

lainnya adalah *group-dependent capabilities* yaitu kapabilitas seseorang dimana sesuatu yang dicapainya bergantung pada kapabilitas kelompok. Berikutnya adalah *direct group capabilities* yaitu segala macam kapabilitas dimana kelompok memiliki akses langsung. Kelompok lainnya yaitu *proper group capabilities* merupakan kapabilitas kelompok yang jika kelompok tersebut dapat mewujudkan kapabilitas tersebut, tetapi anggota sendiri tidak bisa. Menurut Van Hees, ini hanyalah beberapa contoh dari berbagai jenis kapabilitas yang dapat didefinisikan dalam kerangka umum teori ini, dimana masih dimungkinkan tipe kapabilitas lainnya untuk dapat diidentifikasi.

Menurut Stewart (2009), banyak kapabilitas seperti akses ke sekolah dan kekuatan politik lebih mudah dijelaskan di tingkat kelompok, namun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan individu daripada kelompok. Menurutnya, tidak perlu membangun konsep kapabilitas kelompok dengan nilai terpisah yang melekat padanya dan di atas nilai yang melekat pada kemampuan anggota kelompok untuk diperhatikan dan dianalisis ketidaksetaraannya antar kelompok. Stewart (2005) menyatakan bahwa keanggotaan seseorang pada suatu kelompok mempengaruhi kesejahteraan seseorang dalam beberapa cara diantaranya dapat berdampak langsung pada kesejahteraan ataupun kesejahteraan seseorang dapat dipengaruhi oleh seberapa baik kelompoknya dengan apa yang dilakukannya. Ini menunjukkan bahwa capability dalam konsep CA lebih mengarah pada kemampuan pribadinya (kapabilitas individu).

Banyak ekonom yang mempertanyakan operasionalitas konsep kapabilitas Amartya Sen, diantaranya adalah Martha Nussbaum. Teori kapabilitas menurut Martha Nussbaum merupakan salah satu teori pengembangan atas teori Amartya Sen. Pada dasarnya Nussbaum sepakat dengan Amartya Sen dalam pemahaman mengenai kapabilitas manusia yaitu kemampuan aktual untuk melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu (Nussbaum, 2006), namun Nussbaum (2003) menilai perspektif kebebasan Amartya Sen terlalu kabur. Pendapat Martha Nussbaum tentang kebebasan yaitu bahwa beberapa kebebasan membatasi yang lain, beberapa kebebasan itu penting, ada yang sifatnya sepele, ada yang baik, dan ada yang buruk.

Penelitian Ayuningsasi dan Sukadana (2022) menunjukkan bahwa kebebasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *Sulinggih* di Bali. Pembatasan kebebasan *Sulinggih* di Bali berdampak terhadap penurunan kesejahteranaannya. Dalam masyarakat Hindu di Bali, terdapat beberapa aturan sosial tidak tertulis yang harus ditaati oleh seorang *Sulinggih*, diantaranya adalah tidak boleh ke pasar (*tan wenang ke pasar agung*), ke jalan (*tan wenang ke margi agung*), dan ke perjudian (*tan wenang ke pajudian*). Beberapa aturan lain yang dipahami secara luas pada masyarakat Bali bahwa *Sulinggih* tidak boleh berbelanja atau melakukan transaksi jual beli, tidak boleh mengendarai mobil atau sepeda motor, tidak boleh bekerja atau memperoleh pendapatan dari pekerjaan lain selain dalam kaitannya dengan tugasnya sebagai rohaniawan, tidak boleh datang ke pasar atau tempat umum yang tidak terkait dengan pelaksanaan upacara agama, serta berbagai aturan sosial lainnya.

Dalam pelaksanaannya, berbagai aturan dan larangan ini berkembang sesuai dengan persepsi masing-masing yang tidak jarang menimbulkan polemik dan kontroversi pada masyarakat Hindu di Bali. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan terkait dengan aturan dan larangan tersebut dan kurangnya pemahaman terkait dengan alasan dibalik diterapkannya berbagai aturan yang ada. Di lain sisi, aturan ini menjadi sangat berbeda penerapannya bagi *Sulinggih* itu sendiri, karena aturan oleh gurunya (*Nabe*) mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, seorang *Nabe* yang cenderung konservatif akan menekankan untuk sangat taat pada aturan yang ada, di lain sisi terdapat *Nabe* yang cenderung fleksibel dalam menaati berbagai aturan tersebut, sehingga pemberian batasan yang ditetapkan oleh *Nabe* bersifat sangat subjektif dan cenderung sangat berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Aturan-aturan yang diberlakukan kepada *Sulinggih* pada dasarnya adalah untuk menjaga kesucian *Sulinggih*, karena umat memiliki kewajiban untuk ikut menjaga kesucian *Sulinggih* (PHDI, 2002) agar tidak kotor (*leteh*), maupun disalahkan, dicaci maki, diumpat, atau dituduh (*ujar ala*). Diantaranya aturan bahwa *Sulinggih* tidak boleh lagi mengendarai mobil atau sepeda motor adalah

untuk menghindari permasalahan hukum ketika terjadi hal yang tidak diinginkan di jalan. Berbagai larangan dan aturan ini “mengikat” keberadaan *Sulinggih* di Bali dan mengindikasikan adanya pembatasan kebebasan individu dalam aspek kemanusiaan, khususnya terkait dengan terbatasnya pilihan dan kesempatan dalam upaya pencapaian kesejahteraan seperti yang disyaratkan dalam teori kesejahteraan menurut Amartya Sen.

Dalam masyarakat Hindu di Bali, *Sulinggih* pada dasarnya diikat oleh *brata* atau pantangan pokok yang disebut *Catur Bandana Brata* atau *Sasana Kawikon* (Wiradnyana, 2019) yakni *amari aran* (berganti nama dan diberi nama *abhiseka*), *amari wesa* (berganti tingkah laku), *amari busana* (berganti tata busana), dan *amari wisaya* (mengubah pola kehidupan dan kesenangan). Dari keempat jenis pantangan pokok ini, *amari busana* merupakan aturan yang paling membatasi ruang gerak *Sulinggih* yang dapat mempengaruhi kapabilitasnya karena kewajiban *Sulinggih* untuk senantiasa berpenampilan selayaknya seorang *Sulinggih* termasuk ketika melakukan berbagai aktivitas sehari-hari yang tidak berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Penampilan yang menjadi ciri melekat seorang *Sulinggih* laki-laki (*Sulinggih Lanang*) umumnya mengenakan pakaian adat Bali yang dinominasi warna putih dan kuning dengan rambut diikat di atas kepala (*nada*) atau *maprucut* atau disebut *jatama kuta*, sedangkan *Sulinggih* perempuan (*Sulinggih Istri*) juga berpenampilan pakaian adat Bali yang didominasi dengan warna putih dan kuning dengan rambut yang diikat ke atas (*magelung lingga*) dan memakai selendang sebagai tutup dada. Ciri yang melekat pada penampilan *Sulinggih* di Bali membatasi aktivitas hariannya di tengah beragamnya pemahaman masyarakat di Bali terkait berbagai aturan dalam upaya turut menjaga kesucian *Sulinggih*. Di sisi lainnya, *Sulinggih* juga selayaknya manusia biasa yang harus dijamin pemenuhan kapabilitasnya untuk dapat mencapai kesejahteraannya.

### **Resources dalam Pengukuran Kesejahteraan *Sulinggih* di Bali**

Dalam analisis kesejahteraan dengan CA, *resources* dan *commodities* ditempatkan sebagai sarana, cara, atau upaya untuk mencapai *functionings* melalui *capabilities* yang dapat dipilih maupun kesempatan atau peluang untuk mencapainya. Menurut Robeyns (2005), untuk beberapa dari kapabilitas individu, *input* utamanya adalah sumber daya keuangan dan produksi ekonomi, tetapi bisa juga praktek politik dan institusi, misalnya adanya jaminan dan perlindungan yang efektif terhadap kebebasan berpikir, partisipasi politik, praktek sosial atau budaya, struktur sosial, institusi sosial, barang publik, norma sosial, tradisi, dan kebiasaan. Ini berarti *resources* terkait dengan pendekatan ini dapat dibedakan menjadi sumber daya material dan non-material (Sulistiyawati, 2018).

Sumber daya material yang dimiliki oleh individu umumnya ditunjukkan oleh pendapatan atau kekayaan yang dimiliki. Dengan pendapatan atau kekayaan yang dimiliki, seseorang dapat membeli barang dan jasa atau komoditas (*commodities*) dalam upaya untuk memiliki kapabilitas untuk mencapai kesejahteraannya. Menurut Brandolini & D'Alessio (1998), orang-orang dengan pendapatan yang sama, kesejahteraan yang dicapai akan berbeda antara satu dengan lainnya tergantung karakteristik setiap individu.

Kuklys (2005) menjelaskan bahwa terdapat masalah kesalahan pengukuran dalam menggunakan pendapatan sebagai pengukuran kesejahteraan yang disebabkan oleh adanya fakta bahwa individu sering tidak melaporkan pendapatannya dan sumber kesalahan pengukuran lainnya, bahkan jika dilaporkan dengan benar, pendapatan saat ini mungkin tidak mencerminkan secara tepat tingkat kesejahteraan individu dalam jangka panjang. Ini adalah kasus ketika rumah tangga memiliki pendapatan sementara lebih tinggi atau lebih rendah daripada biasanya selama periode pelaporan. Itulah sebabnya dalam pengukuran kesejahteraan dengan CA menurut Amartya Sen, pendapatan tidak ditempatkan sebagai *functionings* melainkan sebagai *resources* yang akan mengantarkan individu pada kapabilitas untuk mencapai *functionings*.

Sen (2009) mengungkapkan bahwa pendapatan atau kekayaan adalah cara yang tidak memadai untuk menilai keuntungan (*advantages*) dalam konteks kehidupan manusia. Menurutny

kekayaan jelas bukan kebaikan yang dicari karena itu hanya berguna untuk sesuatu yang lain. Kekayaan bukanlah sesuatu yang dihargai demi dirinya sendiri juga tidak selalu merupakan indikator yang baik dari kehidupan yang dapat dicapai berdasarkan kekayaan. Dalam hal ini dicontohkan seseorang dengan cacat berat tidak dapat dinilai lebih beruntung semata-mata karena memiliki pendapatan atau kekayaan yang lebih besar daripada tetangganya yang sehat. Seorang penyandang disabilitas yang lebih kaya mungkin akan mengalami banyak hal yang mana orang yang lebih miskin tanpa kekurangan fisik mungkin tidak mengalaminya.

Menurut Sen (2009), dalam menilai keuntungan yang dimiliki orang yang berbeda dibandingkan satu sama lain, maka harus dilihat kemampuan keseluruhan yang berhasil dinikmati atau dicapai. Ini menjadi salah satu argumen penting dalam CA dibandingkan pendekatan lainnya yang berpusat pada sumber daya pendapatan dan kekayaan sebagai dasar evaluasi. Dapat dikatakan bahwa CA berfokus pada kehidupan manusia dan bukan hanya pada sumber daya yang dimiliki. Terkait dengan hal ini, Amartya Sen juga tidak memungkiri bahwa orang yang berbeda dapat memiliki peluang yang sangat berbeda untuk mengkonversi pendapatan dan barang primer lainnya menjadi ciri-ciri kehidupan yang baik dan menjadi jenis kebebasan yang dihargai dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, hubungan antara sumber daya dan kesejahteraan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing orang dan lingkungan tempat tinggalnya.

Sumber daya juga dapat dipahami dalam arti luas. Menurut Kuklys (2005), pendapatan finansial dan sumber daya non-pasar juga termasuk dalam kategori ini. Selain pendapatan dan kekayaan, sumber daya yang dimiliki oleh individu yang dapat digunakan untuk mencapai kapabilitas juga dapat diperoleh dari produksi yang tidak dipasarkan (*non-market production*), misalnya barang dan jasa yang dihasilkan dalam rumah tangga (Sulistiyawati, 2020). Selain itu, terdapat juga dana yang ditransfer dari pihak lainnya, misalnya dari pemerintah juga termasuk dalam kategori sumber daya dalam pengukuran kesejahteraan dengan CA.

Pendapatan yang umumnya diterima oleh *Sulinggih* di Bali dapat diidentifikasi berupa *punia* atau *sesari* yang diterima dari umat. Nilai *punia* dan *sesari* ini sangat bervariasi dan bersifat tidak tetap (rutin). *Punia* atau *sesari* biasanya diberikan ketika *Sulinggih* telah menyelesaikan tugas memimpin suatu kegiatan agama (*muput upakara*). Selain haturan dari umat berupa *sesari* atau *punia*, kepemilikan kekayaan menjadi salah satu sumber pendapatan *Sulinggih*. Beberapa *Sulinggih* memiliki kekayaan yang diperoleh dari warisan orangtuanya dan beberapa *Sulinggih* memiliki kekayaan yang berhasil dikumpulkan dari masa muda ketika belum menjadi *Sulinggih* (ketika masih *walaka*) khususnya bagi *Sulinggih* yang melaksanakan *diksa* (upacara menjadi *Sulinggih*) pada usia tua atau masa pensiun. Pendapatan lainnya yang juga diperoleh oleh *Sulinggih* untuk membiayai kehidupannya adalah bersumber dari anak-anaknya yang sudah memiliki pekerjaan dan sudah mapan, karena umumnya *Sulinggih* di Bali mulai menjadi rohaniawan pada usia tua (di atas usia 40 tahun). Usia 40 tahun ini merupakan batas umur terendah yang ditentukan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia yaitu majelis organisasi umat Hindu yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial di Indonesia. Selain pendapatan dan kekayaan, sumber daya yang diperoleh oleh *Sulinggih* di Bali juga dapat diperoleh dari hasil produksi yang tidak dipasarkan (*non-market production*), seperti barang kebutuhan yang diperoleh dari umat Hindu dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas *muput upakara*. Sesuai tradisi yang berkembang pada masyarakat Hindu di Bali, setiap pelaksanaan upacara agama yang melibatkan *Sulinggih* sebagai pemimpin upacara, biasanya beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara umat akan memberikan haturan berupa *penuwuran* yaitu berupa bahan makanan seperti beras, kelapa, telur, minyak goreng, gula pasir, kopi, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kemampuan umat (bersifat sukarela) dan *rayunan peranda* yaitu hidangan berupa makanan dan minuman yang dapat disantap oleh *Sulinggih* setelah upacara selesai dilaksanakan (Ayuningsasi & Sukadana, 2021).

Jenis pendapatan lain yang juga diidentifikasi sebagai sumber pendapatan *Sulinggih* adalah berupa bantuan dari pemerintah. Bantuan dana dari pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu wujud pelaksanaan persembahan suci kepada rohaniawan (*Rsi Yadnya*) dalam agama

Hindu. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terkait dengan hal ini adalah berupa tunjangan atau insentif yang dialokasikan oleh beberapa kabupaten/kota di Bali sejak lima tahun terakhir. Tunjangan atau insentif kepada *Sulinggih* sudah diberikan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dengan besaran yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain tunjangan, pemerintah daerah juga memberikan layanan kesehatan berupa asuransi, sebagai contoh di Kabupaten Badung pada tahun 2020 memberikan tunjangan kepada *Sulinggih* masing-masing 1,5 juta rupiah per bulan dan melaksanakan *Universal Health Coverage* yang memberikan jaminan kesehatan dan memberikan perawatan VIP untuk rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit Mangusada bagi rohaniawan Hindu (Agus Aryanta, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian Ayuningsasi & Sukadana (2021), hanya 10 persen *Sulinggih* di Bali yang memperoleh bantuan dana rutin dari pemerintah, sedangkan sisanya menyatakan tidak memperoleh bantuan dana. Dari data terlihat bahwa hanya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang masih konsisten hingga tahun 2021 memberikan bantuan dana kepada *Sulinggih*. Hal ini karena kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

### **Commodities dalam Pengukuran Kesejahteraan *Sulinggih* di Bali**

Sen (1999) mengkritisi bahwa banyak ekonom selama ini lebih fokus pada hubungan antara komoditas dengan individu atau masyarakat. Hal ini mengarahkan pembahasan dan kajian lebih lanjut pada bagaimana masyarakat mengatur pembuatan atau pengadaan komoditas, pengelolaannya, dan manfaat yang diperoleh dari komoditas tersebut. Menurut Sen (1999), komoditas (*commodities*) adalah barang atau jasa yang digunakan untuk mencapai suatu *functioning*. Sen (1999) memberikan contoh terkait dengan hal ini yaitu komoditas roti yang memiliki banyak karakteristik, salah satunya adalah menghasilkan nutrisi diantaranya dapat memberikan kalori, protein, dan lain-lain. Selain nutrisi, roti juga memiliki karakteristik lain, misalnya membantu aktivitas berkumpul sambil makan dan minum, atau memenuhi tuntutan konvensi sosial atau perayaan. Untuk orang tertentu pada titik waktu tertentu, memiliki lebih banyak roti dapat meningkatkan sampai titik tertentu, kemampuan orang tersebut untuk berfungsi (mencapai sesuatu) dengan hidup tanpa kekurangan kalori, dapat menghibur orang lain, dan sebagainya. Ini berarti suatu komoditas dapat meningkatkan kapabilitas seseorang dalam mencapai sesuatu (*functioning*).

Pengukuran komoditas dalam CA merujuk pada barang dan jasa yang dikonsumsi, sehingga individu mampu mencapai sesuatu atau menjadi sesuatu untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Kuklys (2005), ketika rumah tangga membuat keputusan konsumsi, dapat digunakan jumlah atau nilai pengeluaran rumah tangga. Namun, pengukuran kesejahteraan individu ditinjau dari pendapatan atau pengeluaran pada tingkat rumah tangga menimbulkan dua masalah lebih lanjut. Pertama, rumah tangga yang memiliki ukuran dan komposisi berbeda membutuhkan tingkat pendapatan yang berbeda untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sama. Kedua, alokasi sumber daya intra-rumah tangga yang tidak setara harus diabaikan.

Pengeluaran konsumsi sebagai proksi komoditas (*commodities*) dalam pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*), dapat dihubungkan dengan jenis barang kebutuhan manusia berdasarkan intensitas atau kepentingannya yang dapat dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Barang kebutuhan primer terdiri dari pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Ini sesuai dengan standar hidup sejahtera yang dianut oleh masyarakat beragama Hindu di Bali yaitu *wareg* (terpenuhinya kebutuhan pangan), *wastra* (terpenuhinya kebutuhan sandang), dan *wisma* (terpenuhinya kebutuhan papan). Untuk kebutuhan sekunder terkait dengan kebutuhan akan barang dan jasa dalam usahanya menambah kebahagiaan atau untuk memenuhi kebutuhan psikologis yang dapat dikaitkan dengan konsep *waras*, sedangkan untuk kebutuhan tersier terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan harga diri, prestise, atau gengsi di masyarakat atau dalam tatanan sosial, sehingga dapat dimasukkan dalam konsep *wasita*.

Abraham Maslow merumuskan teori motivasi positif yang juga dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Maslow (1954) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Konsep ini digambarkan dalam lima tingkatan yang berbentuk piramida, sehingga lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow yang dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Menurutnya, kebutuhan pada suatu tingkatan setidaknya harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Kelima tingkatan kebutuhan (Maslow, 1954) adalah (a) kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya), (b) kebutuhan akan rasa aman (merasa aman dan terlindung, serta jauh dari bahaya), (c) kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki), (d) kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan), serta (e) kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif yang meliputi mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik meliputi keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri meliputi mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya).

Pengeluaran konsumsi oleh *Sulinggih* di Bali untuk mengukur komoditas (*commodities*) yang dimilikinya dalam pengukuran kesejahteraan dengan CA, juga dapat dihubungkan dengan berbagai pengeluarannya yang berkaitan dengan jenis barang-barang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk memenuhi standar hidup sejahtera yang dianut oleh masyarakat beragama Hindu di Bali, maka *Sulinggih* juga harus memenuhi kebutuhan pokok (primer) yang meliputi kebutuhan akan makanan (*wareg*), pakaian (*wastra*), dan perumahan (*wisma*). Pemenuhan kebutuhan sekunder oleh *Sulinggih* yaitu kebutuhan psikologis (*waras*) juga meliputi kebutuhan akan rasa aman, kemudian dilanjutkan pada kebutuhan akan rasa cinta, dan rasa memiliki. Terpenuhinya kebutuhan tersier (*wasita*) yaitu kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kondisi *Sulinggih* di Bali yang merupakan rohaniawan yang berumah tangga (*wiku grhasta*) menyebabkan pengeluaran konsumsi *Sulinggih* tidak dapat dilepaskan dari konsumsi rumah tangganya, sehingga pengukuran komoditas yang harus dipenuhinya dalam upaya mencapai kesejahteraan juga berkaitan dengan pengeluaran rumah tangganya, yaitu pengeluaran untuk memenuhi kondisi *wareg*, *wastra*, *wisma*, *waras*, dan *wasita*.

### **Conversion Factors dalam Pengukuran Kesejahteraan *Sulinggih* di Bali**

Dalam teori kesejahteraan menurut Amartya Sen, terdapat beberapa faktor yang mempunyai efek kontingensi yang kuat pada pengaruh *capabilities* dan *functionings*. Salah satu faktor yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pencapaian kapabilitas (*capabilities*) menurut Amartya Sen diantaranya adalah faktor konversi (*conversion factor*) yang melekat pada diri setiap individu. Terkait dengan pengukuran kesejahteraan dengan CA, Zwierzchowski & Panek (2020) menyatakan bahwa kumpulan kapabilitas yang tersedia untuk individu dibatasi oleh objektivitas faktor eksternal dan karakteristik individu dengan kata lain kemampuan untuk melakukan konversi dari sumber daya menjadi kapabilitas.

Menurut Sen (2009) terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan bervariasinya konversi pendapatan (sumber daya yang dimiliki individu) menjadi hal-hal yang berharga bagi seorang individu atau untuk mencapai *functionings*, diantaranya adalah heterogenitas pribadi, keanekaragaman dalam lingkungan fisik, variasi dalam iklim sosial, dan perbedaan dalam perspektif relasional. Heterogenitas pribadi yaitu orang-orang memiliki karakteristik fisik yang berbeda dalam kaitannya dengan usia, jenis kelamin, kecacatan, kerentanan terhadap penyakit dan seterusnya, sehingga membuat kebutuhannya sangat beragam, misalnya orang cacat atau sakit mungkin membutuhkan lebih banyak pendapatan untuk melakukan hal yang sama dengan orang yang normal.

Lebih lanjut menurut Sen (2009), keanekaragaman dalam lingkungan fisik yaitu seberapa banyak pendapatan yang akan dihabiskan tergantung juga pada kondisi lingkungan, termasuk

keadaan iklim seperti kisaran suhu atau banjir. Kondisi lingkungan tidak dapat diubah oleh individu, namun bisa ditingkatkan dengan upaya bersama, atau diperburuk oleh polusi. Individu yang terisolasi kemungkinan harus menanggung lebih banyak dari kondisi lingkungan, yaitu dengan mengkonversi pendapatan dan sumber daya pribadi ke dalam capaian dan kualitas hidup.

Faktor konversi lainnya adalah adanya variasi dalam iklim sosial yaitu konversi sumber daya pribadi menjadi capaian juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, termasuk kesehatan publik dan epidemiologi, pengaturan pendidikan publik, serta tindak kejahatan dan kekerasan di lokasi tertentu. Selain fasilitas umum, hubungan masyarakat bisa menjadi sangat penting, seperti yang baru-baru ini ditekankan dalam literatur yaitu mengenai modal sosial. Perbedaan dalam perspektif relasional juga merupakan salah satu faktor konversi dalam pendekatan kapabilitas menurut Amartya Sen. Hal ini dimaksudkan yaitu adanya pola mapan dari perilaku dalam suatu komunitas dapat secara substansial mengubah kebutuhan untuk pendapatan untuk mencapai capaian dasar yang sama, misalnya untuk dapat “tampil di depan umum tanpa rasa malu” mungkin membutuhkan standar pakaian yang lebih tinggi (Sen, 2009).

Robeyns (2005) dan Kuklys (2005) mensintesa konsep faktor konversi menurut Amartya Sen ini menjadi tiga jenis faktor konversi, yaitu faktor konversi pribadi (misalnya metabolisme, kondisi fisik, jenis kelamin, pengetahuan atau kecerdasan), faktor konversi sosial (budaya, kebijakan sosial, dan hierarki sosial), dan faktor konversi lingkungan (keadaan lingkungan). Faktor konversi ini membentuk serangkaian karakteristik yang memicu transformasi sumber daya yang tersedia menjadi *functionings* yang dicapai.

Terkait dengan adanya faktor konversi ini, selayaknya insan manusia lainnya, banyak hal yang dapat mempengaruhi kemampuan *Sulinggih* dalam mengkonversi sumber daya yang dimiliki menjadi komoditas yang akan dimanfaatkan untuk menjadi atau mencapai capaiannya. Heterogenitas faktor pribadi *Sulinggih* diantaranya kondisi fisik, misalnya kondisi karena penyakit atau kecacatan, jenis kelamin, dan pengetahuan terkait dengan wawasan *kesulinggihan* maupun wawasan umum. Untuk faktor sosial diantaranya adalah kondisi sosial kemasyarakatan dimana *Sulinggih* melakukan interaksi sosial, sedangkan faktor lingkungan adalah kondisi fisik lingkungan tempat tinggal (*griya*). Perbedaan-perbedaan faktor konversi yang melekat pada setiap individu *Sulinggih* ini dapat mempengaruhi kapabilitasnya, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraannya.

### **Social Choices dalam Pengukuran Kesejahteraan *Sulinggih* di Bali**

Amartya Sen memberikan perhatian besar pada teori pilihan sosial (*social choices theory*). Teori pilihan sosial sangat berkaitan dengan konsep kebebasan yang diungkapkan oleh Amartya Sen, karena keputusan yang diambil terkait pilihan sosial akan berdampak pada peningkatan ataupun pengurangan kebebasan seorang individu dalam kaitannya dengan upaya mencapai kesejahteraannya. Secara konseptual, pilihan sosial dapat dimaknai sebagai semua pilihan atau keputusan yang dibuat secara kolektif (Arrow *et al.*, 2010). Ini berarti berbagai kebijakan publik atau norma dan aturan yang dibuat oleh masyarakat setempat termasuk ke dalam pilihan sosial yang dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian kesejahteraan individu.

Menurut Sen (1988), kebebasan memilih sangat penting untuk menjalani kehidupan yang baik karena fokus dari kebebasan memilih adalah untuk melakukan evaluasi dan penilaian ekonomi. Sama halnya dengan konsep kesejahteraan, kesejahteraan sosial, standar hidup, perilaku pilihan yang konsisten dan rasional yang dapat diuji kembali dengan memberikan perhatian yang lebih memadai dengan menggunakan perspektif kebebasan. Ide tentang kebebasan ini tidak selalu mempengaruhi kontrol seseorang secara eksklusif, namun juga dapat dipengaruhi oleh intervensi dari pihak lainnya dalam artian orang lain dapat memiliki alasan untuk ikut terlibat dalam pemahaman seseorang dalam menentukan pilihannya. Ini berarti ada ruang untuk intervensi dari pihak eksternal

dalam mengalokasikan sumber daya dan kemampuan untuk memilih pemanfaatan yang tersedia (Gotoh, 2021).

Lebih lanjut, Amartya Sen menganalisis penilaian yang dilakukan oleh seseorang dapat bersumber dari individu atau komunitas lainnya, sehingga komunitas berperan besar dalam membentuk sistem nilai yang dianut oleh seseorang. Komunitas dan lingkungan tempat tinggal memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai etika dan norma (Sen, 1999). Meskipun komunitas memiliki pengaruh dan peran besar dalam membentuk diri dan penilaian setiap orang, pada kenyataannya setiap individu tetap memiliki kapasitas untuk memilih (kebebasan untuk memilih).

Berkaitan dengan hal ini, Amartya Sen juga memberikan perhatian besar pada teori pilihan sosial. Teori pilihan sosial yang dikembangkan oleh Amartya Sen merupakan hasil kritisi teori pilihan sosial oleh Kenneth J. Arrow. Dalam teori pilihan sosial yang dikembangkan oleh Arrow, metode perbandingan antarpribadi (*interpersonal comparisons*) tidak diakui, sedangkan Amartya Sen memodifikasi teori ini dengan memasukkan metode perbandingan antarpribadi dalam teori pilihan sosialnya (Sunaryo, 2017). Sebagai pengantar dalam pemahaman konsep pilihan sosial ini, (Arrow, 2012) menyebutkan terdapat dua metode dalam menentukan pilihan sosial yaitu *voting* dan mekanisme pasar. Menurut (Arrow, 2012), kedua metode tersebut merupakan metode penggabungan rasa dari setiap individu dalam membuat pilihan sosial. Sedangkan teori pilihan sosial menurut (Sen, 2017) mendukung adanya konsensus umum atau kebulatan suara (*unanimity*) sebagai dasar tindakan penentuan pilihan sosial. Menurut Amartya Sen, kesulitan pilihan sosial muncul justru ketika kebulatan suara tidak menjawab pertanyaan banyak orang.

Secara konseptual, pilihan sosial menurut Amartya Sen dapat dimaknai sebagai semua pilihan atau keputusan yang dibuat secara kolektif (Arrow *et al.*, 2010). Dalam ulasan oleh Sunaryo (2017) diberikan contoh yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai hidup sehat tidak hanya ditentukan oleh upaya yang dilakukannya sendiri, tercapainya harapan itu juga ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Pertanyaan lanjutan dari hal ini adalah sejauh mana kebijakan publik yang dibuat oleh memperluas harapan masyarakat untuk hidup sehat, sehingga jawabannya sangat tergantung pada mekanisme dan hal yang menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan publik. Hal ini akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu contoh dari pilihan sosial (*social choice*) berdasarkan teori ini.

Teori pilihan sosial sangat berkaitan dengan konsep kebebasan yang diungkapkan oleh Amartya Sen, karena keputusan yang diambil terkait pilihan sosial akan berdampak pada peningkatan ataupun pengurangan kebebasan seorang individu. Dalam teori pilihan sosial tradisional terdapat kecenderungan untuk menjadikan nilai manfaat (utilitas) sebagai pertimbangan utama karena hal ini sangat terkait dengan pandangan manusia ekonomi. Menurut Sen (1985), masalah utama yang membuat hasil keputusan sosial cenderung tidak dapat memenuhi tuntutan seluruh kondisi individu adalah karena keterbatasan informasi (*informational constraint*). Keterbatasan informasi ini terjadi karena pada saat pertimbangan suatu pilihan yang dianggap penting oleh setiap anggota masyarakat tidak hanya menyangkut satu aspek saja. Dalam hal ini, aspek kesejahteraan atau secara spesifik aspek manfaat (utilitas) yang akan diterima oleh setiap individu.

Amartya Sen menjelaskan lebih lanjut adanya kekuatan penentuan (*decisive power*) dari teori pilihan sosial (Gotoh, 2021). Konsep ini mengindikasikan adanya sebuah bagian dari status sosial yang disebut dengan kebebasan kesejahteraan dan kebebasan berperilaku yang dimiliki oleh setiap individu yang dapat berubah tergantung pada keinginannya. Menurut Gotoh (2021), kapabilitas individu juga dibedakan berdasarkan atas beragam kelompok faktor individu dan sosial. Faktor-faktor tersebut secara terpisah tergantung pada lembaga sosial termasuk hambatan sosial

secara informal dan secara parsial tergantung pada pilihan-pilihannya berdasarkan fungsi penilaian secara individu.

Lebih lanjut menurut Sen (2017), dalam teori pilihan sosial juga melibatkan gagasan preferensi individu. Dalam hal ini, menurutnya kondisi konsistensi biasanya diterapkan untuk masing-masing, namun juga ada beberapa kondisi asimetri antara keduanya. Ketika individu memiliki urutan preferensi yang jelas, korespondensi internal untuk fungsi pilihan individu dapat diperoleh sebagai hubungan keterlibatan tanpa terlalu banyak masalah. Di sisi lain, terdapat ambiguitas terkait dengan apa yang dapat dilihat oleh masyarakat yang membuatnya lebih sulit untuk menyimpulkan korespondensi internal untuk fungsi pilihan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan preferensi pribadi belum tentu cocok dengan preferensi kolektif, karena sesuatu yang dianggap bernilai bagi seseorang belum tentu dianggap bernilai oleh pihak lainnya.

Keputusan yang dibuat berdasarkan pilihan sosial ini menjadi kebijakan publik yang akan mempengaruhi tingkat pencapaian kesejahteraan individu. Demikian juga dengan pencapaian kesejahteraan *Sulinggih*, selain dipengaruhi oleh pilihan dan kesempatan individu yang berpotensi untuk diubah menjadi capaian yang berharga bagi dirinya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat diantaranya terkait dengan pemerintah daerah, maupun dari lembaga keagamaan yang menaunginya (Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI), dan masyarakat setempat (adat) juga dapat menjadi kendala ataupun peluang yang dapat diubah menjadi capaian kesejahteraan *Sulinggih* di Bali.

### **Pembahasan**

Pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*) untuk pengukuran kesejahteraan yang dikemukakan oleh Amartya Sen sejak dua dekade yang lalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para ekonom dan peneliti. Teori yang dikemukakan dalam pendekatan ini mengubah perspektif ekonom-ekonom dunia terkait pengukuran kesejahteraan yang umumnya mengikuti pandangan arus utama, namun konsep-konsep yang diperkenalkan dalam pendekatan kapabilitas bersifat sangat normatif dan cenderung mengarah pada konsep-konsep filosofi. Hal ini yang menimbulkan kesulitan tersendiri bagi peneliti lanjutan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep dalam teori ini.

Kajian-kajian terkait dengan konsep kebebasan dan pendekatan kapabilitas secara teoritis sudah banyak dilakukan oleh peneliti di bidang ekonomi maupun bidang filosofi, namun kajian secara empiris masih relatif terbatas. Beberapa kajian dalam lingkup makro dengan menggunakan data sekunder diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sen (1999), Balestrino & Sciclone (2001), dan Qizilbash (2002). Pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan kapabilitas agak menyulitkan penelitian untuk lingkup luas seperti pada lingkup negara karena variabel-variabelnya membutuhkan penilaian yang cenderung bersifat personal. Hal ini menyebabkan beberapa peneliti berusaha menguraikan teori ini dengan kajian-kajian dalam lingkup yang lebih sempit (mikro) diantaranya oleh Schokkaert & Van Ootegem (1990), Balestrino (1994), Laderchi (1997), Brandolini & D'Alessio (1998), Martinetti (2000), Klasen (2000), Lelli (2001), Phipps (2002), Burchardt & LeGrand (2002), Robeyns (2003), Anand *et al.* (2005), Kuklys (2005), dan Anand & Van Hees (2006).

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, analisis yang dilakukan hanya terbatas pada variabel kapabilitas (*capabilities*) dan capaian (*functionings*). Selain mengkaji dua variabel tersebut, dalam penelitian ini juga menambahkan kajian terhadap konsep sumber daya (*resources*), komoditas (*commodities*), faktor konversi (*conversion factor*), dan pilihan sosial (*social choices*) sebagai variabel penelitian. Dengan menambahkan variabel-variabel tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan konsep teori pengukuran kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*) secara komprehensif.

Penelitian ini merupakan kajian yang menggunakan pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*) dalam lingkup mikro dengan subjek penelitian adalah *Sulinggih* yang merupakan

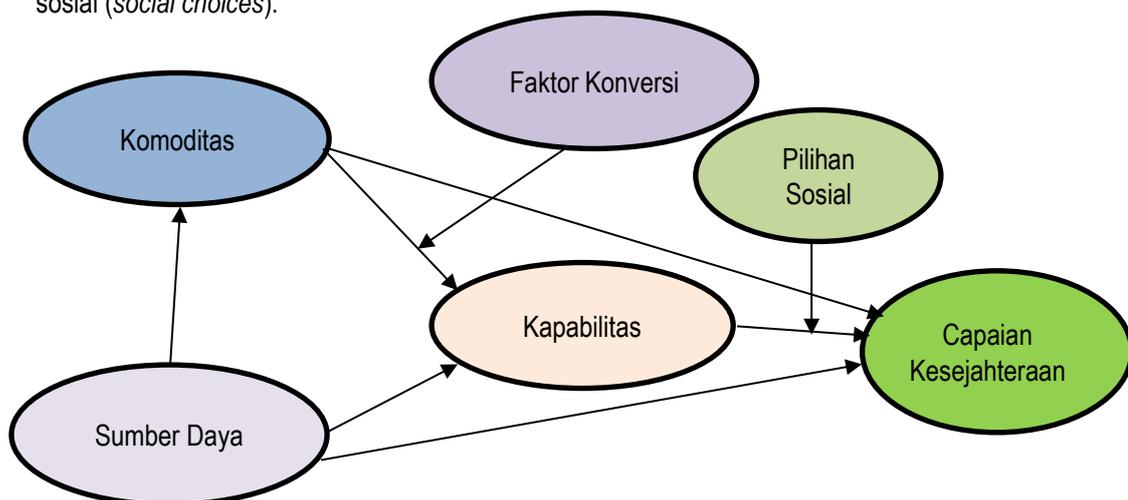
rohaniawan umat beragama Hindu di Bali. Pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen sangat relevan digunakan sebagai teori dan konsep untuk menganalisis kesejahteraannya. Penelitian yang menggunakan para rohaniawan sebagai subjek penelitian sangat terbatas, apalagi yang dikaitkan dengan pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*), sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kekosongan literatur terkait dengan hal ini. Teori kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas (CA) digunakan sebagai kerangka utama dalam menganalisis kesejahteraan rohaniawan Hindu (*Sulinggih*) di Bali. Studi ini mengamati hubungan beberapa variabel yang disebutkan dalam teori kesejahteraan dengan CA, diantaranya *resources*, *commodities*, *capabilities*, *conversion factors*, *social choices*, dan *functionings*.

Penelitian mengenai analisis kesejahteraan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian yang menganalisis kesejahteraan rohaniawan sebagai salah satu lapisan masyarakat sering luput dari perhatian berbagai pihak. Kajian berbagai fenomena dan nilai-nilai yang diterapkan dalam agama Hindu di Bali juga masih terbatas, khususnya terkait analisis kesejahteraan rohaniawannya. Penelitian ini merupakan pengembangan model konseptual dari teori kesejahteraan menurut Amartya Sen dengan menggunakan pendekatan kapabilitas, yang dalam penelitian ini dengan menganalisis kesejahteraan *Sulinggih* yang merupakan rohaniawan agama Hindu di Bali. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan berupa konsep teori kesejahteraan bagi rohaniawan dan juga mengembangkan instrumen pengukuran kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*) menurut Amartya Sen.

Selain menggunakan variabel kapabilitas (*capabilities*) dan capaian kesejahteraan (*functionings*), penelitian ini juga menggunakan variabel sumber daya (*resources*), komoditas (*commodities*), faktor konversi (*conversion factor*), dan pilihan sosial (*social choices*) yang selama ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya terkait dengan analisis kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*). Dalam penelitian ini juga memasukkan beberapa indikator yang berbeda dengan indikator yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yang menyesuaikan dengan kondisi *Sulinggih* di Bali.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antarvariabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam model pendekatan kapabilitas (*capabilities approach*) menurut Amartya Sen digambarkan keterkaitan antara sumber daya (*resources*), komoditas (*commodities*), dan kapabilitas (*capabilities*) yang akan mempengaruhi capaian (*functionings*) seorang individu.

Berdasarkan model yang dibentuk, maka variabel-variabel tersebut dapat diidentifikasi sebagai variabel endogen, eksogen, mediasi, dan moderasi. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah capaian kesejahteraan (*functionings*), sedangkan variabel eksogennya adalah sumber daya (*resources*). Variabel yang memediasi adalah komoditas (*commodities*) dan kapabilitas (*capabilities*), sedangkan variabel moderasi adalah faktor konversi (*conversion factor*) dan pilihan sosial (*social choices*).



### Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 1 menunjukkan adanya pengaruh langsung sumber daya (*resources*) yang dimiliki oleh *Sulinggih* di Bali terhadap komoditas (*commodities*) yang dapat diperoleh oleh *Sulinggih* di Bali, kemudian komoditas (*commodities*) yang dapat diperoleh oleh *Sulinggih* di Bali berpengaruh langsung terhadap kapabilitas (*capabilities*) yang dapat dicapai oleh *Sulinggih* di Bali, dan sumber daya yang dimiliki oleh *Sulinggih* berpengaruh langsung terhadap kapabilitas yang dapat diperoleh oleh *Sulinggih* di Bali. Sumber daya yang dimiliki oleh *Sulinggih* di Bali juga dapat berpengaruh langsung terhadap capaian kesejahteraan *Sulinggih* di Bali, demikian juga komoditas yang dapat diperoleh oleh *Sulinggih* di Bali berpengaruh langsung terhadap capaian kesejahteraan *Sulinggih* di Bali, dan kapabilitas yang dapat dicapai oleh *Sulinggih* di Bali berpengaruh secara langsung terhadap capaian kesejahteraan *Sulinggih* di Bali.

Dalam model ini juga digambarkan adanya pengaruh tidak langsung yaitu dengan meningkatnya sumber daya (*resources*) yang dimiliki oleh *Sulinggih* di Bali, maka akan meningkatkan komoditas (*commodities*) yang dapat diperoleh, sehingga mampu meningkatkan kapabilitas (*capabilities*) *Sulinggih* di Bali. Dalam model ini terdapat pengaruh tidak langsung antara sumber daya yang dimiliki oleh *Sulinggih* terhadap kapabilitas yang dapat dicapainya melalui komoditas yang dapat diperoleh. Selain itu, dalam model ini juga menggambarkan adanya pengaruh moderasi faktor konversi (*conversion factor*) yang dihadapi oleh *Sulinggih* di Bali yang mempengaruhi hubungan antara komoditas (*commodities*) yang dapat diperoleh oleh *Sulinggih* di Bali dengan kapabilitas (*capabilities*) yang dapat dicapai oleh *Sulinggih* di Bali, sedangkan pilihan sosial (*social choices*) yang dihadapi oleh *Sulinggih* di Bali mempengaruhi hubungan antara kapabilitas (*capabilities*) yang dapat dicapai oleh *Sulinggih* di Bali dengan capaian kesejahteraan (*functionings*) *Sulinggih* di Bali.

## PENUTUP

Sebuah kerangka kerja analisis kesejahteraan rohaniawan dengan CA telah diperkenalkan dalam kertas kerja ini. Fenomena terkait kesejahteraan rohaniawan Hindu (*Sulinggih*) di Bali telah dijelaskan dengan baik didasarkan pada variabel-variabel dalam analisis kesejahteraan CA. Kerangka kerja ini dapat melengkapi kajian-kajian para ekonom terkait analisis kesejahteraan dengan CA menurut Amartya Sen. Kajian teoritis dalam kertas kerja ini dapat dilanjutkan dengan melakukan kajian secara empiris mengenai fenomena terkait kesejahteraan rohaniawan yang serupa dengan kondisi rohaniawan di Bali (*Sulinggih*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Aryanta, I. K. (2020). Tahun 2020 *Sulinggih* dan Mangku Dapat Gaji. *Tribun-Bali.Com*.
- Amartya, S. E. N. (1988). Freedom of choice: concept and content. *European Economic Review*, 32(2-3), 269-294.
- Anand, P., Hunter, G., & Smith, R. (2005). Capabilities and well-being: Evidence based on the Sen-Nussbaum approach to welfare. *Social Indicators Research*, 9-55.
- Anand, P., & Van Hees, M. (2006). Capabilities and achievements: An empirical study. *The Journal of Socio-Economics*, 35(2), 268-284.
- Arrow, K. J. (2012). *Social choice and individual values* (Vol. 12). Yale university press.
- Arrow, K. J., Sen, A., & Suzumura, K. (2010). *Handbook of social choice and welfare* (Vol. 2). Elsevier.
- Ayuningsasi, Ketut, A. A., & Sukadana, I. W. (2021). Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Ekonomi *Sulinggih* di Bali (Studi Kasus Ida Pandita Mpu). *Laporan Akhir Penelitian*. Denpasar:

*Universitas Udayana.*

- Balestrino, A. (1994). A Note on Functioning-Poverty In Affluent Societies. *Rivista Internazionale Di Scienze Sociali*, 125–141.
- Balestrino, A., & Sciclone, N. (2001). Should we use functionings instead of income to measure well-being? Theory, and some evidence from Italy. *Rivista Internazionale Di Scienze Sociali*, 3–22.
- Bickerton, G. R., Miner, M. H., Dowson, M., & Griffin, B. (2015). Spiritual resources as antecedents of clergy well-being: The importance of occupationally specific variables. *Journal of Vocational Behavior*, 87, 123–133.
- Blanton, P. W., & Morris, M. L. (1999). Work-related predictors of physical symptomatology and emotional well-being among clergy and spouses. *Review of Religious Research*, 331–348.
- Brandolini, A., & D'Alessio, G. (1998). Measuring well-being in the functioning space. *General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth, Cracow, Poland*.
- Britz, J., Hoffmann, A., Poneis, S., Zimmer, M., & Lor, P. (2013). On considering the application of Amartya Sen's capability approach to an information-based rights framework. *Information Development*, 29(2), 106–113.
- Burchardt, T., & LeGrand, J. (2002). Constraint and Opportunity: Identifying Voluntary Non-Employment Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE). *London School of Economics, London*.
- Crespo, R. F. (2013). *Theoretical and practical reason in economics: capacities and capabilities*. Springer Science & Business Media.
- Frame, M. W., & Shehan, C. L. (1994). Work and well-being in the two-person career: Relocation stress and coping among clergy husbands and wives. *Family Relations*, 196–205.
- Garnham, N. (2007). Habermas and the public sphere. *Global Media and Communication*, 3(2), 201–214.
- Gasper, D. (1997). Sen's capability approach and Nussbaum's capabilities ethic. *Journal of International Development*, 9(2), 281–302.
- Gotoh, R. (2021). *The Ethics and Economics of the Capability Approach*. Springer.
- Haney, B. R. (2008). The relationship between labor market structure and clergy compensation in Protestant denominations. *Atlantic Economic Journal*, 36, 65–75.
- Juniarta, H. P., **Susilo, E.**, & Primyastanto, M. (2013). Kajian profil kearifan lokal masyarakat pesisir pulau gili kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo Jawa Timur. *ECOSOFIM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, 1(1).
- Klasen, S. (2000). Measuring poverty and deprivation in South Africa. *Review of Income and Wealth*, 46(1), 33–58.
- Kuklys, W. (2005). *Amartya Sen's capability approach: Theoretical insights and empirical applications*. Springer.
- Laderchi, C. R. (1997). Poverty and its many dimensions: The role of income as an indicator. *Oxford Development Studies*, 25(3), 345–360.
- Lelli, S. (2001). *Factor Analysis vs. Fuzzy Sets theory: Assessing the influence of different techniques on sen's functioning approach*. Katholieke Universiteit Leuven Leuven, Belgium.
- Martinetti, E. C. (2000). A multidimensional assessment of well-being based on Sen's functioning approach. *Rivista Internazionale Di Scienze Sociali*, 207–239.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. Harper & Row, Publishers, Inc. New York.
- Mok, K., & Jeong, W. (2016). Revising Amartya Sen's capability approach to education for ethical development. *Asia Pacific Education Review*, 17, 501–510.
- Nussbaum, M. (2003). Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social justice. *Feminist Economics*, 9(2–3), 33–59.
- Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of Justice Disability, Nationality, Species Membership*. London: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.

- Ok, Ü. (2009). Cognitive conflict and well-being among Muslim clergy. *Archive for the Psychology of Religion*, 31(2), 151–176.
- Parker, P. D., & Martin, A. J. (2011). Clergy motivation and occupational well-being: Exploring a quadripartite model and its role in predicting burnout and engagement. *Journal of Religion and Health*, 50, 656–674.
- PHDI. (2002). *Bhisama Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 3/Bhisama/Sabba Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang Pengamalan Catur Warna*.
- Phipps, S. (2002). The well-being of young Canadian children in international perspective: A functionings approach. *Review of Income and Wealth*, 48(4), 493–515.
- Proeschold-Bell, R. J., Miles, A., Toth, M., Adams, C., Smith, B. W., & Toole, D. (2013). Using effort-reward imbalance theory to understand high rates of depression and anxiety among clergy. *The Journal of Primary Prevention*, 34, 439–453.
- Proffitt, D., Cann, A., Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2007). Judeo-Christian clergy and personal crisis: Religion, posttraumatic growth and well being. *Journal of Religion and Health*, 46, 219–231.
- Qizilbash, M. (2002). A note on the measurement of poverty and vulnerability in the South African context. *Journal of International Development*, 14(6), 757–772.
- Robeyns, I. (2003). The capabilities approach: An interdisciplinary introduction. *Department of Political Science and Amsterdam School of Social Sciences Research Working Paper, University of Amsterdam, Amsterdam*.
- Robeyns, I. (2005). The capability approach: a theoretical survey. *Journal of Human Development*, 6(1), 93–117.
- Rosales, A., Fung, J., & Lee, C. (2021). Clergy well-being: The role of lived values and values fit. *Journal of Psychology and Theology*, 49(1), 53–66.
- Schokkaert, E., & Van Ootegem, L. (1990). Sen's concept of the living standard applied to the Belgian unemployed. *Recherches Économiques de Louvain/Louvain Economic Review*, 56(3–4), 429–450.
- Sen, A. (1999). Commodities and capabilities. *OUP Catalogue*.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Sen, A. (2017). *Collective choice and social welfare: An expanded edition*. Harvard University Press.
- Stewart-Sicking, J. A., Ciarrocchi, J. W., Hollensbe, E. C., & Sheep, M. L. (2011). Workplace characteristics, career/vocation satisfaction, and existential well-being in Episcopal clergy. *Mental Health, Religion & Culture*, 14(7), 715–730.
- Stewart, F. (2005). Groups and capabilities. *Journal of Human Development*, 6(2), 185–204.
- Stewart, F. (2009). Horizontal inequality: two types of trap. *Journal of Human Development and Capabilities*, 10(3), 315–340.
- Sulistiyawati, A. (2020). Berbagai Makna Sate Pada Upakara Umat Hindu Di Bali. *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, 3(2), 65–80.
- Sulistiyawati, A. (2018). The Role Of Cultural Values In Motivating The Competencies Of Hindu Balinese Human Resources In Tourism To Gain Manager Level Positions In Rated Hotels In Bali. *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, 1(1), 1–12.
- Sulistiyawati, A. (2019). Tradisi Megibung, Gastrodiplomacy Raja Karangasem. *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, 1(2), 1–22.
- Sunaryo. (2017). Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan. *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*.

- Susilo, E. (2010). *Dinamika struktur sosial dalam ekosistem pesisir*. Universitas Brawijaya Press.
- Susilo, E., Purwanti, P., & Fattah, M. (2017). *Adaptasi Manusia: Ketahanan Pangan dan Jaminan Sosial Sumberdaya*. Universitas Brawijaya Press.
- Tanner, M. N., & Zvonkovic, A. M. (2011). Forced to leave: Forced termination experiences of Assemblies of God clergy and its connection to stress and well-being outcomes. *Pastoral Psychology, 60*, 713–726.
- Tanner, M. N., Zvonkovic, A. M., & Adams, C. (2012). Forced termination of American clergy: Its effects and connection to negative well-being. *Review of Religious Research, 54*, 1–17.
- Thomas, S. N., & Plante, T. G. (2015). Psychological well-being of Roman Catholic and Episcopal clergy applicants. *Pastoral Psychology, 64*, 875–881.
- Trawick, M. W., & Lile, S. E. (2007). Religious market competition and clergy salary: Evidence from SBC congregations in the South. *American Journal of Economics and Sociology, 66*(4), 747–763.
- Walker, D. S., Lankshear, D. W., & Vann, C. E. (2018). How Are You, Vicar? A Study in Scripture, Psychology and Clergy Wellbeing in an English Diocese. *Rural Theology, 16*(2), 80–92.
- Wiana, I. K. (2006). *Berbisnis Menurut Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wiradnyana, I. B. G. (2019). *Membumikan Weda Mengukur Peran Teks dan Guru Suci. Hindu dan Tradisinya Beberapa Risalah*.
- Zwierzchowski, J., & Panek, T. (2020). Measurement of subjective well-being under capability approach in Poland. *Polish Sociological Review, 210*, 157–178.